

BAB III

PENGERTIAN DAN SEJARAH PEMILU DI INDONESIA

Pemilihan umum, atau pemilu, adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap lima tahun untuk memilih dan menentukan pemimpin serta wakil masyarakat dalam pemerintahan. Kegiatan ini melibatkan partisipasi masyarakat, lembaga, dan instansi yang mengurus pemilihan serta pengawasan pemilu. Pemilu melibatkan berbagai partai politik dan calon pemimpin daerah.

Dalam konteks politik dan pergantian pemimpin, pemilu memiliki peran penting sebagai salah satu pondasi primer dalam langkah mengumpulkan kehendak masyarakat. Berdasarkan situs resmi KPU, pemilu adalah proses demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih pemimpinnya. Pemilu harus diimplementasikan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu diatur secara rinci dalam Pasal 1 angka 1. Pemilihan Umum yang berikutnya mengatakan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memutuskan anggota DPRD Pemilu diimplementasikan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

²⁴Bahan Paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum dan Komisi II DPR RI, 14 April 2020

Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵

Pemilu berfungsi sebagai fasilitas bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatan mereka dan merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi. Secara teoritis, pemilihan umum dipandang sebagai tahap awal dalam kehidupan tata negara yang demokratis, serta menjadi penggerak utama mekanisme politik di Indonesia. Pemilu tetap dianggap sebagai peristiwa kenegaraan yang signifikan karena melibatkan partisipasi langsung seluruh rakyat. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam politik dan sistem pemerintahan..

Rakyat yang berdaulat tidak dapat memerintah secara langsung, sehingga pemilu berfungsi untuk memungkinkan mereka memilih wakil-wakilnya. Para wakil yang terpilih akan menentukan siapa yang memegang tampuk pemerintahan. Dengan demikian, pemilu berperan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik, di mana rakyat dapat memilih wakil yang dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan mereka.

Semakin berkualitas pemilu, semakin baik pula kualitas wakil rakyat yang terpilih dalam lembaga perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk pergantian pemimpin, dapat mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau mewujudkan reformasi. Pemerintahan yang aspiratif akan mendapatkan kepercayaan rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan, sementara pemerintahan yang tidak dipercaya harus diakhiri dan digantikan. Selain itu, pemilu

²⁵<https://jdih.kpu.go.id> di akses pada tanggal 25 juli 2023 pukul 12.00 wib

juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan legitimasi kepada pemimpin politik, di mana suara pemilih merupakan mandat rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pemimpin politik yang terpilih memperoleh legitimasi dari rakyat melalui pemilu. Sebagai sarana partisipasi politik, pemilu memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memengaruhi kebijakan publik dengan mendukung kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang berhasil terpilih berkat dukungan rakyat diharapkan dapat memenuhi janji-janji mereka saat menjalankan pemerintahan. Secara ringkas, tujuan pemilu adalah untuk memilih para pemimpin baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan mendapatkan dukungan rakyat, sesuai dengan UUD 1945.²⁶

1. Pemilu 1955

Pemilu 1955 dilaksanakan pada periode demokrasi parlementer di bawah kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu ini terdiri dari dua tahap: pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September 1955, dan pemilihan anggota Konstituante pada 25 Desember 1955. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik serta lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perseorangan. Pemilu ini dianggap sebagai salah satu yang paling demokratis dan sehat dalam sejarah Indonesia. Pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional, di mana kursi yang

²⁶<https://jdih.kpu.go.id> diakses pada 02 agustus 2023 pada pukul 01.00 wib

tersedia dibagikan kepada partai politik berdasarkan jumlah suara yang mereka peroleh, sistem ini juga dikenal sebagai sistem berimbang.

Pada 5 Juli 1959, Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara dan membubarkan Konstituante serta DPR hasil Pemilu, serta menggantinya dengan DPR-GR. Kabinet yang ada juga diganti dengan Kabinet Gotong Royong. Dalam struktur baru ini, Ketua MPR, DPR, MA, dan BPK diangkat sebagai pembantu Sukarno dengan jabatan menteri.

2. Pemilu 1971,1982, 1989, 1992 dan 1997

Pemilu kedua diadakan pada tahun 1971, Setelah Soeharto diputuskan menjadi Presiden melalui Sidang Umum MPRS (TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968), pemilu mengalami penundaan dari agenda semula sebab dasar keamanan. Pemilu tersebut berjalan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Menurut informasi dari laman Kemendikbud, pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan 1 organisasi massa, yaitu NU, Parmusi, PSII, PERTI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, PNI, dan Golkar. Hasil Pemilu 5 Juli 1971 menunjukkan Golkar sebagai partai dengan suara mayoritas, diikuti oleh NU, PNI, dan Parmusi. Setelah pemilu ini, Sidang Umum MPR pada Maret 1973 melantik Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pada tahun 1977, menandai dimulainya pemilihan umum secara periodik setiap lima tahun. Pemilu 1977, yang diadakan pada masa Orde Baru, bertujuan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Pemilu ini dilakukan setelah penyederhanaan atau

penggabungan partai (fusi) pada 1973, mengurangi jumlah partai peserta dari sepuluh menjadi tiga. Partai-partai yang terbentuk adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hasil gabungan NU, Parmusi, PERTI, dan PSII; Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hasil gabungan PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba; serta Golkar. Ketiga partai, yaitu PPP, PDI, dan Golkar, terus dipertahankan hingga Pemilu 1997. Golkar, sebagai mayoritas tunggal, tetap dominan pada pemilu 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu ini diikuti oleh Sidang Umum MPR yang melantik kembali Soeharto sebagai Presiden dan H. Adam Malik Batubara sebagai Wakil Presiden.²⁷

3. Pemilu 2004

Pemilu 2004 mencatat sejarah baru dengan partisipasi aktif rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, berkat amandemen UUD 1945. Pada Pemilu 2004, ada dua agenda utama: pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Pemilu untuk DPR, DPD, dan DPRD diadakan pada 5 April 2004, diikuti dengan Pemilu Presiden yang berlangsung dalam dua putaran: Putaran pertama dilaksanakan pada 5 Juli 2004 dan putaran kedua pada 20 September 2004. Pemilu ini dilakukan secara bertahap dengan melibatkan 24 partai politik sebagai peserta.

Pada Pemilu 2004, diterapkan sistem ambang batas parlemen (electoral threshold) sebesar tiga persen dari total perolehan suara, seperti yang diberlakukan

²⁷<https://jdih.kpu.go.id> diakses pada tanggal 4 agustus 2023 pukul 09.00 wib

pada Pemilu 1999. Dalam pemilihan Presiden, terdapat lima pasangan calon. Hasilnya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2004 hingga 2009.²⁸

4. Pemilu 2009

Pemilu 2009 tidak banyak berbeda dari Pemilu 2004, tetapi terdapat berbagai perubahan signifikan terkait ambang batas pencalonan Presiden dan parlemen. Dalam Pemilu 2009, ketentuan untuk pemilihan presiden menetapkan bahwa Paspren pemenang harus memperoleh lebih dari 50% suara nasional serta minimal 20% suara di setiap daerah tingkat I, dengan sebaran di lebih dari 50% jumlah daerah tingkat I di Indonesia. Sementara itu, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) ditetapkan sebesar 2,5%.

Pemilu DPR, DPD serta DPRD diadakan pada 09 April 2009, diikuti oleh Pemilu Presiden pada 8 Juli 2009. Pada pemilu ini, terdapat 38 partai politik yang berpartisipasi. Hanya 9 partai yang berhasil memenuhi ambang batas parlemen, yaitu Demokrat, Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2009 hingga 2014.

²⁸<https://jdih.kpu.go.id> diakses pada tanggal 05 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB

5. Pemilu 2014

Dilaksanakannya Pemilu DPR, DPD, dan DPRD berikutnya, diadakan pada 9 April 2014 di dalam negeri dan dari 30 Maret hingga 6 April 2014 di luar negeri. Sementara itu, Pemilu Presiden dilaksanakan dalam satu putaran pada 9 Juli 2014. Pemilu 2014 melibatkan 15 partai politik, termasuk tiga partai lokal Aceh dan 12 partai nasional, yaitu PKB, PDI-P, Demokrat, Golkar, PPP, PAN, NasDem, PKS,, PBB, PKPI, Hanura, dan Gerindra.

Dari 12 partai nasional tersebut, hanya 10 partai yang berhasil memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 3,5 persen suara. Partai-partai yang lolos adalah Demokrat, NasDem, PDI-P, Gerindra, Golkar, PAN, PPP,, PKS, PKB,dan Hanura. Dalam pemilihan presiden, terdapat dua pasangan calon: Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla melawan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 hingga 2019..²⁹

6. Pemilu 2019

Pemilu dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden pada 17 bulan 04. Dalam pemilu tersebut, terdapat 14 partai politik tingkat nasional serta 4 partai politik local daerah Aceh berpartisipasi. Sembilan partai diantaranya berhasil lolos ke Senayan, yaitu Gerindra, Demokrat, Golkar, PDI-P, PAN PKB,PKS, NasDem,, dan

²⁹<https://jdih.kpu.go.id> diakses pada tanggal 05 agustus 2023 pukul 18`20

PPP. Sementara itu, 7 partai lainnya memperoleh suara di bawah ambang batas parlemen harus gagal masuk parlemen.

Dalam pemilihan presiden, terdapat dua pasangan calon yang bersaing: Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditantang kembali oleh Prabowo Subianto yang kalah pada periode pemilu sebelumnya dan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 hingga 2024 dengan memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, serta pasangan Prabowo-Sandi mendapatkan 68.650.239 suara atau 44,50 persen.³⁰

7. Pemilu 2024

Pemilu 2024 yang baru saja dilakukan pada tanggal 14 Februari lalu menjadi pesta demokrasi yang sangat meriah dimana pada pemilu tersebut kita kan memilih dengan 5 surat suara diantaranya surat suara untuk pemilihan Presiden, surat suara untuk pemilihan DPR RI, surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi, surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dan surat suara untuk pemilihan DPD semua itu dilakukan hanya dalam satu hari. Pesta demokrasi ini selalu saja berhasil menyita perhatian masyarakat. Masyarakat menyambut dengan gembira pesta demokrasi yang dilaksanakan di periode waktu 5 tahun sekali dengan harapan siapapun yang terpilih dapat membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera dengan program program yang disampaikan. Pemilu 2024 merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Instansi yang

³⁰<https://jdih.kpu.go.id> diakses pada tanggal 05 agustus 2023 pukul 18.20

menyelenggarakan pemilu yaitu KPU melakukan banyak sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada pemilih pemula dan mahasiswa untuk datang dan menggunakan hak pilihnya. Begitu juga dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu juga memberikan sosialisasi kepada remaja dan mahasiswa untuk mengajak mereka sama sama mengawal dan mengawasi pemilu juga mengajak mereka untuk ikut bergabung sebagai pengawas pemilu di berbagai tingkatan dengan harapan agar remaja dan mahasiswa tidak apatis dalam mengawasi pemilu. Demi meningkatkan kesadaran pemilu KPU dan Bawaslu memberikan pendidikan politik.

Bagaimana andil yang diberikan mahasiswa sebagai mitra pengawas pemilu? Mahasiswa yang berasal dari berbagai jurusan yang heterogen dan memiliki pandangan luas diharapkan mampu membantu lembaga atau pemerintah untuk turut serta mengawasi pemilu. Mahasiswa mampu menggerakkan lapisan masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi pemilu dengan banyak cara, salah satu cara yang melekat dengan kaum muda atau mahasiswa adalah dengan memanfaatkan media sosial, kegiatan kampus, serta turut serta bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ikut andil dalam mengawasi pemilu.³¹

Pada masa kampanye, kerentanan terhadap pelanggaran pemilu semakin meningkat dari pada tahapan tahapan sebelum kampanye, disinilah partisipasi mahasiswa sebagai mitra Bawaslu sangat dibutuhkan,

³¹<https://www.bawaslu.go.id> diakses pada pukul 05 agustus 2023 pada pukul 19.30 wib

Mahasiswa harus terlibat dalam setiap langkah-langkah pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk memastikan kesuksesan pemilu, mahasiswa perlu berperan aktif seperti halnya KPU dan Bawaslu. Langkah pertama yang dapat diambil oleh mahasiswa adalah menyimak jalannya pemilu. Penting untuk diingat bahwa pekerjaan pengawasan pemilu bukan hanya terletak pada Bawaslu, namun partisipasi mahasiswa juga sangat diperlukan. Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan pemilu berlangsung dengan jujur dan adil (jurdil). Dengan ide-ide kreatif yang mereka miliki, mahasiswa dapat membantu penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, partisipasi mahasiswa sangat penting untuk mengoptimalkan pemilu menempuh sokongan partisipatif.

Mengandalkan cuma pada KPU dan Bawaslu untuk pengawasan pemilu tidaklah cukup, mengingat luasnya wilayah dan jumlah penduduk di Indonesia. SDM yang tersedia di KPU dan Bawaslu juga terbatas. Karena itu, mahasiswa perlu turut berperan dalam mengawasi proses pemilu yang akan datang. Mahasiswa dapat menyampaikan metode-metode efektif untuk pengawasan pemilu dan melakukan tindakan yang diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya pemilu yang berjalan sesuai dengan asas demokrasi. Edukasi kepada masyarakat juga penting, untuk menekankan bahwa saatnya bangsa Indonesia memilih pemimpin yang tepat melalui pemilu 2024. Masyarakat perlu didorong agar tidak membuat kesalahan dalam memilih pemimpin, karena masa depan bangsa dan negara sangat bergantung pada keputusan pemilihan di tahun 2024.

Mengenai hal positif tersebut dapat difungsikan oleh mahasiswa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Selain itu, mahasiswa juga dapat menginformasikan kepada masyarakat bahwa politik uang dan kampanye hitam harus dilawan dan tidak boleh dibiarkan berevolusi. Masyarakat perlu mengetahui bahwa praktik-praktik tersebut dapat mencelakakan proses demokrasi dalam pemilu mendatang. Cara ini, pemilu dapat terselenggara dengan lebih efisien dan cita-cita nasional dapat terwujud.

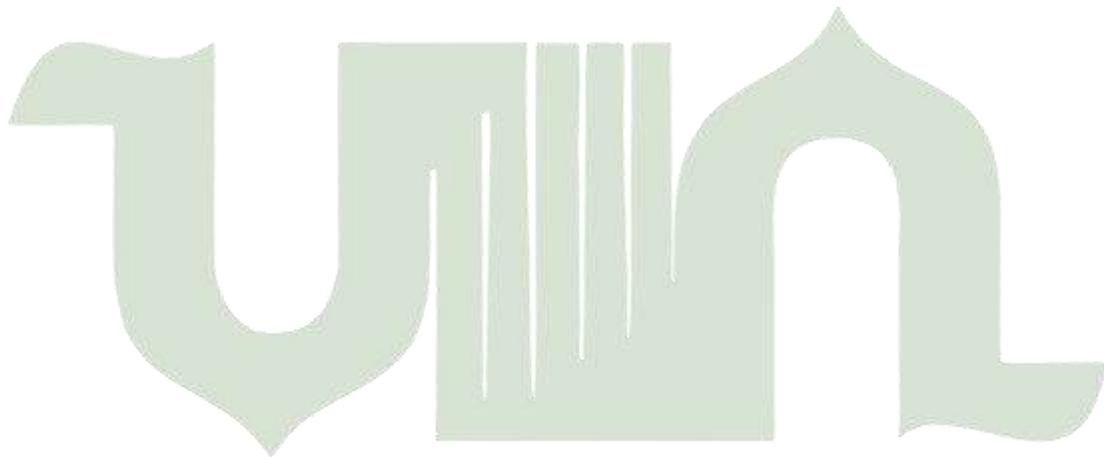
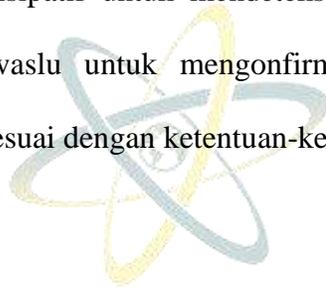
Untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang sesuai, dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa pengawasan partisipatif. Satu tugas Bawaslu adalah melaksanakan pekerjaan pengawasan partisipatif di perguruan tinggi guna mengefesienkan keterlibatan masyarakat, terutama kelompok mahasiswa, dalam pengawasan pemilu yang akan datang di Indonesia. Bersumber data sensus penduduk tahun 2020, sekitar 40 persen dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah generasi Z yang memenuhi syarat untuk memilih, dan jumlah ini diperkirakan akan terus menanjak.³²

Seterusnya, partisipasi dalam pemilu bukan hanya terbatas pada datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara. Ini juga mencakup pengawasan partisipatif terhadap potensi kecurangan dan memberitahukan penyelewengan tersebut terhadap Bawaslu, lembaga yang bertanggung jawab mengamati dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran selama proses pemilu. Generasi Z, yang sebagian besar merupakan pengguna aktif media sosial, diharapkan dapat

³²<https://www.bawaslu.go.id> diakses pada tanggal 05 agustus pukul 20.00 wib

memanfaatkan platform ini untuk mengampanyekan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pengawasan pemilu merupakan penugasan bersama, dan kewajiban mahasiswa benar-benar krusial sebagai individu yang kritis. Mereka diharapkan melakukan pengawasan partisipatif untuk mendeteksi potensi penyelewengan dan melaporkannya kepada Bawaslu untuk mengonfirmasi langkah-langkah pemilu beroperasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan dan keadilan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN